



**Perjuangan Mengukuhkan Identitas Nasional:  
Aneksasi Rusia di Krimea dalam Perspektif Konstruktivisme**

**Lintank Wahyu Sudibyo**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Annexation of Crimea by the Russian Federation through the Crimean declaration of independence from Ukraine and the Crimean referendum, as well as the treaty signed by the Russian government in March 2014 have made Crimea as *de facto* join with 21 other republics within Russian territory. However, most of the international community considers that the Crimean referendum is illegal and violates the international law. Because Russia is considered violating Ukraine territorial integrity through the presence of Russian military which is considered to affect the legality of the referendum. This study aims to analyze Russian identity influences Russian foreign policy in the annexation of Crimea. The identity in this case is the Russian national identity which is 'personal identity' in constructivism perspective constructed from Russian domestic concepts or ideas rooted in Russian ethnic, demographic, historical, and spiritual backgrounds that are closely related to Crimea, as well as Russian national identity is on the rise under Vladimir Putin. It will also explain the history, status, and progress of the annexation of Crimea, as well as international sanctions against Russia and the Crimea until 2017.

**Keywords:** *annexation, foreign policy, identity, Russia, Crimea*

**Pendahuluan**

Aneksasi Rusia terhadap Krimea yang bermula sejak Maret 2014 menuai kecaman internasional karena dianggap melanggar kedaulatan Ukraina dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip hukum internasional. PBB mengecam tindakan Rusia tersebut karena Rusia diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Krimea. *UN The Third Committee (Social, Humanitarian and Cultural)* pada tanggal 8 November 2016 mengajukan tujuh draft resolusi, di mana di antaranya menyinggung bagaimana situasi hak asasi manusia di Krimea (*United Nations*, 2016). Draft resolusi tersebut mendesak Rusia untuk segera mengakhiri seluruh pelanggaran terhadap penduduk Krimea seperti, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan mendesak agar mencabut semua undang-undang yang diskriminatif (Osborn, 2016).

Penelitian mengenai aneksasi Krimea oleh Rusia cukup banyak dilakukan. Meskipun begitu, penelitian-penelitian yang sudah ada hanya menitikberatkan pada perspektif realis. Starr (dalam Svarin, 2016: 130) menyebutkan bahwa faktor wilayah dan geopolitik berperan penting di balik aneksasi Krimea. Tandilashvili (2015) mengatakan bahwa aneksasi Rusia di Krimea memberikan kontrol penuh bagi Rusia atas militer, pemerintahan dan fasilitas strategis lainnya di Krimea, yang mana realis klasik memandang tindakan Rusia tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan intervensi dan meningkatkan pengaruhnya ketika ketidakstabilan terjadi di Ukraina. Selain itu, letak geopolitik Sevastopol akan membuka jalan bagi kepentingan Rusia khususnya terkait kepentingan militer Rusia di negara-negara Laut Hitam seperti Turki, Georgia, Bulgaria dan Rumania serta wilayah Mediterania untuk membendung pengaruh NATO (Girgin, 2015).



Sementara itu, Maitra (2014: 128) menyebutkan bahwa latar belakang aneksasi Krimea karena Rusia menghadapi *security dilemma* yakni Rusia merasa terancam oleh kekuatan Barat di negara-negara bekas Uni Soviet. Dalam hal ini, Ukraina yang dianggap Rusia sebagai *buffer zone* justru menunjukkan dukungannya terhadap AS dan NATO, serta menjadi negara yang berpotensi menjadi anggota Uni Eropa. Adapun Yeşilot (2014) menyebutkan bahwa faktor wilayah geografis Ukraina yang strategis menjadikan Ukraina sebagai transit gas Rusia menuju Eropa Barat. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2015 sekitar 158 juta meter kubik gas Rusia memenuhi sebagian besar permintaan gas Eropa dan terdapat kandungan minyak dan gas yang besar di lepas pantai Krimea (Gazpromexport, 2016). Di samping itu, wilayah Krimea kaya akan sumber daya alam semisal kandungan mineralnya yang melimpah, serta merupakan wilayah pesisir dengan iklimnya yang sangat berpotensi sebagai tempat wisata bagi warga negara Rusia (Yeşilot, 2014).

Selain penelitian-penelitian yang secara umum didominasi oleh perspektif realis, terdapat juga penelitian yang menggunakan perpektif yang berbeda, yaitu konstruktivisme. Sasse (dalam Larsen, 2016:24) menyebutkan bahwa terdapat faktor etnis, bahasa, memori dan keyakinan antara Rusia dengan Krimea yang mendorong aneksasi tersebut. Etnis Rusia di Krimea dikatakan mendukung sepenuhnya aneksasi tersebut dengan maksud untuk melestarikan tradisi, sejarah dan bahasa mereka. Krimea merupakan wilayah dengan presentase etnis Rusia terbesar yaitu 58% dan penutur bahasa Rusia terbesar di Ukraina yaitu 77% (Oktaviano dan Fachri 2015: 1902). Oleh karena itu, sebagian besar rakyat dan anggota parlemen serta pejabat eksekutif Krimea menginginkan Rusia sebagai fokus kebijakan luar negeri daripada Uni Eropa ataupun AS.

Meskipun begitu, penelitian-penelitian yang sudah ada lemah dalam beberapa hal. Misalnya, penelitian-penelitian dengan pendekatan realis secara umum cenderung menggunakan bahan rujukan atau sumber dari para peneliti, akademisi dan media barat, sehingga hal ini dapat dikatakan bias, memihak dan tidak seimbang, karena cenderung mendiskreditkan salah satu pihak. Selain itu, penelitian lainnya yang menggunakan pendekatan realis tidak konsisten karena justru memasukkan konstruktivis dalam penjelasannya. Misalnya penelitian Kartini (2014), Oktaviano dan Fachri (2015), dan Larsen (2016) hanya menambahkan perspektif konstruktivis sebagai motivasi aneksasi Krimea dengan analisis, data dan fakta yang kurang tajam dalam menjelaskan aneksasi tersebut. Misalnya, penelitian yang telah disebutkan di atas dalam mbingkai analisis tidak menggunakan kerangka konstruktivisme secara jelas.

Singkatnya, belum ada penelitian yang berfokus pada sudut pandang konstruktivisme secara utuh. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha melengkapi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan perspektif konstruktivisme dengan berfokus pada konsep identitas Rusia di balik aneksasi Krimea secara mendalam. Penulis akan menggunakan bahan rujukan yang bersumber dari para peneliti, akademisi, dan media non-Barat di samping juga menggunakan bahan rujukan dari Barat secara proporsional.

## **Pembahasan**

Berdasarkan sejarahnya yang panjang, Krimea menjadi wilayah yang independen hanya selama kurang dari empat dekade. Sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini, seluruh wilayah Krimea di bawah kekuasaan banyak kerajaan dan negara, seperti bangsa Yunani, Bulgaria, Scythians, Romawi, Gots, Hun, Khazars, Kievan Rus, Kekaisaran Bizantium, Venesia, Genoa, Kipchaks, Mongol Golden Horde, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, Nazi Jerman, dan Ukraina (Bebler, 2015). Krimea menjadi bagian dari wilayah Rusia sejak tahun 1783. Ketika itu, Kekaisaran Rusia menganeksasi Krimea yakni satu dekade setelah mengalahkan pasukan Ottoman dalam Pertempuran Kozludzha (Kramer, 2014). Secara historis, selama lebih dari 200 tahun, Krimea telah menjadi bagian dari



kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Krimea pada dasarnya lebih dekat dengan Rusia secara identitas dan secara militer jika dibandingkan dengan wilayah bekas Uni Soviet lainnya. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa jumlah etnis Rusia menjadi etnis dan budaya mayoritas di Krimea. Sevastopol menjadi kota lahirnya Armada Laut Hitam Rusia, dan kota-kota lainnya seperti Balaklava dan Kerch yang mana dianggap melambangkan kemuliaan dan keberanian militer Rusia di masa lalu (Kremlin, 2014).

Nama resmi maupun status hukum dari semenanjung Krimea seringkali berganti sejalan dengan bergulirnya sejarah. Pemindahan Krimea dari RSFS Rusia ke RSS Ukraina pada tahun 1954 dikatakan ilegal dan inkonstitusional. Parlemen Krimea mendeklarasikan kemerdekaannya dari Ukraina pada tanggal 11 Maret 2014 dan referendum kemudian diselenggarakan pada 16 Maret 2014, yang merupakan referendum ketiga setelah tahun 1991 dan 1994. Namun begitu, AS, Uni Eropa dan sebagian besar komunitas internasional menganggap bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional. Sebab, Rusia menggunakan intervensi militer dan mendesak militer Ukraina di Krimea untuk tidak campur tangan dalam proses aneksasi tersebut.

Selanjutnya, dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Rusia pada tanggal 18 Maret 2014, status Krimea diubah menjadi sebuah republik atau Respublika Krym dan secara de facto bergabung dengan 21 republik lainnya dalam wilayah teritorial Rusia. Meskipun begitu, status Krimea berdasarkan hukum internasional tetap dianggap sebagai bagian dari teritorial Ukraina, terlepas bagaimanapun situasi di Krimea secara de facto, yang mana diadopsi melalui tiga resolusi yaitu pada tahun 2014, 2016 dan 2017. Selain itu, negara-negara seperti AS, Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia maupun Krimea. Namun begitu, perlawanan negara-negara terhadap Rusia mengenai aneksasi Krimea cenderung rendah dan penjatuhan sanksi terhadap Rusia merupakan upaya yang minimal dari komunitas internasional, sehingga potensi Krimea kembali ke dalam wilayah Ukraina dapat dikatakan sulit terjadi.

Doktrin kebijakan luar negeri Rusia beberapa tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2014 hingga 2017 mengalami perubahan yang signifikan. Moskow mulai menempatkan dirinya dalam panggung internasional dengan mendasarkan pada gagasan-gagasan domestik mereka yang berakar dari re-interpretasi sejarah Rusia (Zevelev, 2016). Re-intepretasi sejarah tersebut merujuk pada identitas nasional Rusia. Dalam hal ini, identitas nasional tersebut menjadi dasar dari justifikasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri Kremlin.

Alexander Sergunin (2016: 13) menyatakan bahwa pembentukan sebuah identitas suatu negara bersumber dari dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi domestik dan dimensi internasional. Dimensi domestik memerlukan adanya kohesi internal, konsensus nasional mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan, nilai-nilai, budaya dan aspek spiritual yang sama. Dimensi internasional memerlukan penilaian diri atau identifikasi diri yang mana suatu negara mempersepsikan dirinya sebagai suatu bangsa yang menganggap dirinya sebagai sebuah kesatuan dan sebagai komunitas terbatas yang tentu berbeda dengan bangsa lainnya. Memahami perbedaan dan keunikan antar suatu bangsa juga merupakan hal yang penting bagi pembentukan sebuah identitas. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah internasional, faktor internasional dikatakan lebih signifikan dibandingkan faktor domestik dalam pembentukan identitas nasional. Perdebatan nasional terkait hubungan luar negeri menjadi cara yang ampuh untuk membentuk kembali sebuah identitas nasional. Suatu negara dikatakan dalam memandang dunia internasional ibarat sebuah cermin yang memantulkan bayangan mereka. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam memandang dunia internasional, seperti nasionalisme yang berlebihan sehingga memunculkan chauvinisme yang kemungkinan akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan suatu negara dengan dunia internasional (Sergunin, 2016).



Akar dari identitas Rusia dapat ditelusuri dari perdebatan antara *Slavophiles* dan *Westernizers* pada abad ke-19. *Slavophiles* menekankan pada keunikan peradaban Rusia yang mendasarkan pada tradisi komunitarian Ortodoks Slavik yang mana bertentangan dengan peradaban Barat, khususnya dalam hal rasionalisme. Sementara itu, *Westernizers* berpendapat bahwa Rusia sebaiknya belajar dari rasionalisme Barat. Perbedaan pada saat itu dapat dilihat dari multietnisitas Kekaisaran Rusia dan bagaimana interaksi antara orang-orang Rusia dengan orang-orang non-Rusia. *Slavophiles* meyakini bahwa Rusia membentuk peradabannya sendiri serta Rusia bukanlah Eropa ataupun Asia dan harus mempertahankan identitasnya sendiri (Sergunin, 2016).

Fahruroddji (2005) menyebutkan bahwa *Slavophiles* dalam memandang Rusia yaitu harus mendasarkan pada kekuatan dan kekayaan budaya masa lampau, serta mengekor pada kebudayaan Barat adalah sebuah kesalahan besar. Rusia dikatakan harus menapaki jalannya sendiri yang mendasarkan pada nilai-nilai asli (*samobytnost'*) yang jelas berbeda dengan Barat. *Slavophiles* meyakini bahwa perkembangan bangsa harus berdasarkan pada tiga pilar utama, yaitu Ortodoksi (*Pravoslavie*), Otokrasi (*Samoderzhavie*), dan Kerakyatan (*Narodnost*) yang mana nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dengan semangat kolektif (*sobornost*). Ortodoksi diartikan sebagai kepercayaan yang murni dan diyakini *Slavophiles* sebagai kemurnian ajaran Kristen yang dianut Rusia yang mana dianggap sebagai tingkatan yang lebih tinggi dari peradaban Barat (Fahruroddji, 2005).

Pada tahun 1869, Nicholas Danilevsky seorang *Slavophiles* dalam karyanya yang berjudul *Russia and Europe* menyatakan bahwa perlu untuk menyatukan *Slavophilism*, *pan-Slavism*, dan kebijakan imperialisme. Dalam hal ini, Danilevsky berusaha memperkenalkan gagasan pan-Slavik liberal dalam alam pemikiran imperialis Rusia yang konservatif. Dalam pandangan Danilevsky, ia meyakini bahwa budaya Slavik tersebut mampu dijalankan sebagai dasar dari kepemimpinan Rusia yang mendasarkan pada federasi yang diciptakan oleh orang-orang Slavik (Zevelev, 2016).

Sejalan dengan itu, Feodor Dostoevsky yang juga seorang *Slavophiles* memperkenalkan sebuah gagasan universalisme Rusia. Dostoevsky menyatakan bahwa “*for what else is the strength of the Russian national spirit than the aspiration, in its ultimate goal, for universality and all-embracing humanitarianism?*”. Dalam hal ini, Dostoevsky menekankan pada keterbukaan, inklusivitas dan mesianisme Rusia. Universalisme dari Dostoevsky kemudian dikembangkan oleh Vladimir Solovyov. Solovyov menjustifikasi kebijakan imperialis Rusia terkait daerah-daerah bekas Polandia yang diambil alih oleh Catherine The Great. Solovyov menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan Rusia semata-mata sebagai perwujudan kekuatan dari nilai-nilai kebenaran, kedamaian, ajaran Kristiani dan universalime yang dianut Rusia. Nikolai Berdyaev menguatkan argumen Solovyov yang menyatakan bahwa Rusia mampu memecahkan permasalahan di mana Barat tidak mampu untuk memecahkannya. Solovyov secara tegas menekankan bahwa universalisme Rusia tersebut bertujuan untuk mempersatukan *Slavophilism* (Zevelev, 2016).

Di sisi lain, *Westernizers* memandang bahwa masa depan bangsa Rusia berada dalam persentuhan langsung dengan Barat. Sehingga dikatakan perlu untuk mengadopsi ide-ide Barat demi kemajuan Rusia. Meskipun *Westernizers* dan *Slavophiles* bertentangan secara ideologi, pada dasarnya keduanya dikatakan memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air (Fahruroddji, 2005).

Sementara itu, pada tahun 1920-an, sekelompok intelektual muda yaitu Pyotr Savitsky, Nikolai Trubetskoy, Georgi Frolovsky, Pyotr Suvchinsky, dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa tidak saja *Slavophilism* yang menjadi dasar dari identitas Rusia, melainkan unsur-unsur dari budaya Turki dan Finno-Ugric pun memainkan peran yang penting. Mereka adalah sekelompok orang yang mempelopori gagasan yang menggabungkan orang-orang non-Slavik dalam memahami identitas Rusia, yang disebut dengan





Eurasianisme. Menurut mereka, Eurasia hadir karena adanya kesamaan geografis dan kesadaran bersama yang menganggap bahwa mereka bukanlah bagian dari Eropa maupun Asia (Zevelev, 2016).

Hubungan Rusia dengan negara-negara Post-Soviet jelas dipengaruhi oleh bagaimana interpretasi sejarah Rusia. Dalam hal ini konsep-konsep seperti *Compatriot* atau patriotisme, *the Russian World*, dan peradaban Rusia atau *Russian Civilization* menjadi perhatian dari kebijakan Kremlin terhadap negara-negara post-Soviet sejak tahun 2014 hingga 2017. Gagasan untuk melindungi dan mempertahankan rasa persaudaraan sebangsa Rusia berdasarkan konsep-konsep di atas secara resmi sejak tahun 2014 telah menjadi istilah politik nasional Rusia, yang membentuk narasi nasional terkait bangkitnya kembali Rusia setelah terpuruk di masa setelah runtuhnya Uni Soviet (Zevelev, 2014).

Istilah "*compatriot*" atau "*compatriot abroad*" pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Boris Yeltsin dan Menlu Andrei Kozyrev pada tahun 1992. Istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang hidup di luar perbatasan Rusia namun sadar dan ingin mempertahankan adanya pertalian sejarah, budaya, dan bahasa dengan Rusia terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Sejak 1994, istilah atau konsep "*compatriot abroad*" pada akhirnya menjelma menjadi kebijakan negara dan termasuk mewujud dalam kebijakan luar negeri Rusia (Zevelev, 2014).

Sementara itu, istilah "*Russian World*" yang sebelumnya telah didengungkan oleh Vladimir Putin, namun demikian baru pada tahun 2007 konsep tersebut benar-benar masuk ke dalam perbendaharaan politik Rusia. Konsep ini dipandang lebih memiliki pengertian yang filosofis dan lebih luas dibandingkan dengan istilah "*compatriot*". Berdasarkan pengertian dan norma hukum, "*Russian World*" adalah sebuah gagasan yang didefinisikan berdasarkan identifikasi diri atau persepsi internal Rusia (Zevelev, 2014).

Sementara itu, Dmitry Peskov, atase pers Kepresidenan Kremlin pada 2014 menyatakan bahwa Presiden Putin bertanggungjawab dalam menjamin keamanan "*Russian World*". Hal tersebut jelas mencerminkan perubahan interpretasi Kremlin dalam memaknai keamanan itu sendiri. Bahwa keamanan yang semula hanya didasarkan pada batasan negara kemudian meluas tanpa memperhatikan batasan negara dengan dasar "*Russian World*". Interpretasi tersebut tidak terlepas dari identifikasi diri dan akar sejarah Rusia, serta warisan intelektual *Slavophiles*, Danilevsky, Solovyov dan banyak pemikir lainnya pada abad ke-19 (Zevelev, 2014).

Konsep "*Russian Civilization*" pun berakar dari warisan intelektual *Slavophiles* dan para pemikir dari abad ke-19 seperti Nicholas Danilevsky, Vladimir Solovyov dan lainnya. Sejalan dengan itu, Alexander Dugin, seorang filsuf Rusia juga menyatakan bahwa Rusia lebih merupakan peradaban ketimbang sekadar bangsa. Demikian juga Aleksandr Solzhenitsyn dan Gennadi Zyuganov yang menyatakan bahwa peradaban Rusia dan peradaban Barat jelas berbeda berdasarkan aspek spiritual dan geopolitis (Zevelev, 2016). Menlu Sergey Lavrov menguatkan bahwa situasi politik global yang kompetitif memerlukan kecakapan yang lebih substantif termasuk di dalamnya nilai-nilai dari sebuah peradaban. Kremlin menganggap "*Russian Civilization*" adalah negara Federasi Rusia itu sendiri dengan "*Russian World*", yaitu setiap orang yang mengidentifikasi diri mereka terikat dengan budaya Rusia (Lavrov, 2008).

Gagasan mengenai identitas nasional dianggap signifikan secara politis maupun intelektual oleh para nasionalis Rusia pada rentang waktu 1992 hingga 2011. Meskipun begitu, Post-Soviet Liberalis, Komunis, dan Pragmatis-Sentris seperti masa sebelumnya yaitu pada awal abad ke-20 dikatakan mengabaikan persoalan mengenai identitas nasional (Zevelev, 2016). Setelah terpilihnya kembali Vladimir Putin untuk masa jabatan presiden yang ketiga kalinya, yaitu pada pertemuan *Valdai International Discussion Club* 2013 Putin secara resmi memunculkan kembali persoalan terkait identitas nasional. Putin dalam



pidatonya menegaskan bahwa *power* dan pengaruh suatu negara dalam dunia internasional bergantung pada apakah warga negara di suatu negara menganggap diri mereka sebagai sebuah bangsa, sejauh mana mereka memahami sejarah, nilai dan tradisi mereka, serta apakah mereka dipersatukan oleh tujuan dan tanggung jawab yang sama (Kremlin, 2013). Dalam hal ini, pandangan Putin tersebut jelas menekankan bahwa memahami dan memperkuat identitas nasional Rusia merupakan dasar bagi kebijakan Rusia baik domestik maupun internasional.

Pidato Putin yang disampaikan pada pertemuan *Valdai International Discussion Club* 2013 tersebut menginisiasi rangkaian pernyataan dan pidato publik serta pembicaraan yang membahas persoalan tentang bagaimana mempertahankan identitas Rusia dalam dunia yang secara dramatis semakin berubah. Selama 2013 hingga 2016, persoalan identitas nasional Rusia tidak lagi menjadi subjek akademis saja, namun juga menjadi fokus perhatian dari keamanan dan kebijakan luar negeri Rusia. Presiden Putin dan Menlu Sergey Lavrov pada beberapa tahun tersebut mencanangkan sebuah kebijakan yang merefleksikan pandangan Rusia terhadap dunia internasional berdasarkan pada re-interpretasi sejarah khususnya sejarah intelektual Rusia yang merujuk pada identitas nasional Rusia (Zevelev, 2016).

Putin menyatakan bahwa sejarah Rusia membentuk budaya dan pandangan Rusia terhadap dunia di sekitarnya. Putin secara tegas menyatakan bahwa sejarah Rusia merupakan sumber dari identitas dan misi Rusia sebagai sebuah peradaban. Bahasa dan sastra Rusia juga dianggap sebagai alat untuk mempertahankan identitas nasional. Putin menegaskan bahwa karakter, tradisi, keberlangsungan sejarah dan hubungan antargenerasi adalah suatu identitas yang mempersatukan Rusia. Narasi Kremlin tersebut dikatakan merupakan respon politik maupun intelektual untuk menghadapi tantangan baik internal maupun internasional yang mana diwujudkan ke dalam kebijakan luar negeri (Kremlin, 2016).

Dari aspek demografis, Putin dalam pidatonya menyampaikan bahwa jumlah penduduk Semenanjung Krimea adalah 2,2 juta jiwa, di antaranya hampir 1,5 juta jiwa adalah etnis Rusia, sekitar 290.000-300.000 jiwa adalah etnis Tatar Krimea, serta 350.000 jiwa adalah etnis Ukraina yang secara dominan menganggap bahasa asli mereka adalah bahasa Rusia (Kremlin, 2014). Bahkan menurut sebuah *polling* dikatakan bahwa bahasa Rusia lebih banyak dituturkan dalam percakapan sehari-hari di Ukraina daripada bahasa Ukraina sendiri (Fom, 2009). Sejalan dengan hal itu, PM Rusia Dmitry Medvedev dalam pidatonya menyatakan bahwa hampir sepertiga penduduk Ukraina menganggap bahwa bahasa ibu mereka adalah bahasa Rusia (Medvedev, 2014). Sementara itu, berdasarkan sensus pemerintah Ukraina yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2001 menyatakan bahwa 58,5% penduduk Krimea adalah etnis Rusia, 24,4% etnis Ukraina dan 12,1% Tatar Krimea. Selain itu, analisis survei tersebut menunjukkan bahwa 77,0% menganggap bahasa Rusia sebagai bahasa ibu mereka, disusul bahasa Tatar Krimea sejumlah 11,4% dan bahasa Ukraina sebanyak 10,1% (*All-Ukrainian Population Census' 2001, 2003-2004*).

Menurut pandangan Putin, menjaga identitas nasional menjadi tantangan tersendiri dan menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri yang substantif dan kritis dilihat dari menjalarnya degradasi moral Barat. Putin mencontohkan seberapa banyak negara-negara Euro-Atlantik yang pada akhirnya meninggalkan akar mereka, dalam hal ini nilai-nilai Kristen yang merupakan dasar dari peradaban Barat. Negara-negara tersebut dikatakan telah meniadakan prinsip-prinsip moral dan identitas seperti tradisi, budaya, agama, dan seksualitas. Misalnya negara-negara tersebut telah mengimplementasikan kebijakan yang secara resmi memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Orang-orang di sebagian besar negara-negara Eropa dikatakan merasa malu atau takut untuk berbicara terkait agama, hari raya keagamaan ditiadakan dan atau esensi dari hari raya tersebut dihilangkan yang mana hal ini merujuk pada krisis moral (Kremlin, 2013). Sehingga Putin pun mempromosikan sebuah *think tank* baru, seperti Izborsky Club yang didirikan pada tahun 2012 oleh Alexander



Prokhanov. *Think tank* tersebut berfokus pada nasionalisme Rusia, restorasi dari sejarah Rusia, dan perlawanan sistematis terhadap gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang liberal (Laruelle, 2016).

Putin dalam pidatonya terkait Krimea pada 18 Maret 2014 (Kremlin, 2014) secara tegas mengatakan:

*“we have every reason to assume that the infamous policy of containment, led in the 18th, 19th and 20th centuries, continues today. They are constantly trying to sweep us into a corner because we have an independent position, because we maintain it and because we call things like they are and do not engage in hypocrisy”.*

Kemudian di tahun yang sama, yaitu pada 4 Desember 2014 (Kremlin, 2014) Putin dalam pidatonya menyebutkan:

*“the policy of containment was not invented yesterday. It has been carried out against our country for many years, always, for decades, if not centuries. In short, whenever someone thinks that Russia has become too strong or independent, these tools are quickly put into use”.*

Pidato-pidato resmi Kremlin tersebut merujuk pada akar sejarah permusuhan antara Rusia dengan Barat.

Putin juga menyebutkan aspek spiritual terkait Krimea (Kremlin, 2014). Kota tua Chersonesus atau Korsun dikatakan merupakan tempat di mana Grand Prince Vladimir dibaptis sebelum Kristen kemudian diperkenalkan di Rusia. Pernyataan Putin tersebut yakni:

*“Crimea is where our people live, and the peninsula is of strategic importance for Russia as the spiritual source of the development of a multifaceted but solid Russian nation and a centralised Russian state. It was in Crimea, in the ancient city of Chersonesus or Korsun, as ancient Russian chroniclers called it, that Grand Prince Vladimir was baptised before bringing Christianity to Rus.”*

Selain itu, Putin menambahkan bahwa Korsun atau Chersonesus dan Sevastopol memiliki aspek peradaban yang tidak terhingga nilainya dan merupakan kota yang sakral bagi Rusia, layaknya Jerusalem bagi Muslim dan Yahudi. Berikut ini adalah pernyataan Putin terkait hal tersebut, *“the ancient Korsun or Chersonesus, and Sevastopol have invaluable civilisational and even sacral importance for Russia, like the Temple Mount in Jerusalem for the followers of Islam and Judaism”* (Kremlin, 2014).

Rusia di bawah pemerintahan Putin bekerjasama dan kembali memiliki ikatan kuat dengan Gereja Ortodoks Rusia. Gereja Ortodoks Rusia kini dikatakan menjadi institusi yang mendapat tempat dan kehormatannya kembali, setelah sekian lama mendapat tekanan luar biasa di era Soviet (Myers, 2015). Patriark Kirill Moskow, kepala Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2012 menyatakan dukungannya terhadap Putin dalam pemilihan presiden dan menyatakan bahwa masa pemerintahan Putin adalah sebuah keajaiban dari Tuhan (Gerlach dan Töpfer, 2015). Perlu diketahui bahwa Gereja Ortodoks Rusia dalam hal ini memainkan peran yang strategis. Misalnya, Gereja Ortodoks Rusia ketika itu menjadi sebuah *‘back channel’* dan mediator informal antara Rusia, Georgia dan Ukraina saat terjadi konflik pada dekade 2000-an (Sergunin dan Karabeshkin, 2015).



Identitas Rusia yang mana merupakan *corporate/personal identity* Rusia yang termasuk dalam kategori identitas personal menjadi justifikasi dalam membentuk kebijakan luar negeri Rusia yang kemudian mempengaruhi Rusia untuk menganeksasi Krimea. Hal ini dapat dikuatkan dengan pemikiran Solovyov, seorang *Slavophiles*. Solovyov menjustifikasi bahwa kebijakan imperialis Rusia di masa lampau terkait daerah-daerah bekas Polandia yang diambil alih oleh Catherine The Great merupakan upaya yang bertujuan untuk mempersatukan *Slavophilism* sebagai perwujudan kekuatan dari nilai-nilai kebenaran. Hal ini mengingat bahwa pemindahan Krimea dari RSFS Rusia ke RSS Ukraina pada masa Uni Soviet dikatakan menyalahi sejarah, sehingga hal ini dapat menjadi justifikasi bagi Rusia untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh Rusia berdasarkan sejarah intelektual identitas Rusia yaitu *Slavophilism*. Kemudian konsep-konsep seperti *Compatriot* atau patriotisme, *the Russian World*, dan peradaban Rusia atau *Russian Civilization* merupakan gagasan untuk melindungi dan mempertahankan rasa persaudaraan sebangsa Rusia. Hal ini menimbang bahwa penduduk Krimea mayoritas adalah etnis Rusia dan Rusia menganggap bahwa Ukraina tidak mampu untuk melindungi hak warga Krimea di saat terjadi kekacauan di Ukraina. Selanjutnya Vladimir Putin berperan dalam memunculkan kembali identitas nasional yang mana mendorong masyarakat Rusia dalam memperkuat dan memahami sejarah, nilai dan tradisi mereka. Hal ini tidak terlepas dari keterikatan sejarah, etnis, dan spiritual Krimea dengan Rusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa poin tersebut di atas dapat dikatakan mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia untuk menganeksasi Krimea.

### **Kesimpulan**

Secara umum identitas Rusia membentuk kebijakan luar negeri Rusia yang kemudian mempengaruhi Rusia dalam menganeksasi Krimea. Identitas yang dimaksud adalah identitas nasional Rusia yang merupakan *corporate/personal identity* dalam perspektif konstruktivisme yang terkonstruksi dari konsep ataupun gagasan domestik Rusia yang berakar dari re-interpretasi sejarah Rusia serta latar belakang historis, etnis, demografis, budaya, bahasa dan spiritual Krimea yang bertalian erat dengan Rusia. Secara khusus, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1) Sejarah intelektual identitas nasional Rusia yang mendasarkan pada gagasan, nilai-nilai dan tradisi Rusia seperti *Slavophilism* membentuk kebijakan luar negeri Rusia. (2) Konsep *Compatriot*, *the Russian World*, dan *Russian Civilization* merupakan gagasan untuk melindungi dan mempertahankan rasa persaudaraan sebangsa Rusia berdasarkan interpretasi sejarah Rusia yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia. (3) Identitas nasional Rusia kembali mengemuka di bawah pemerintahan Vladimir Putin. Dalam hal ini, Putin menegaskan bahwa memahami dan memperkuat identitas nasional Rusia dengan mendasarkan pada sejauh mana masyarakat Rusia memahami sejarah, nilai dan tradisi mereka, serta apakah mereka dipersatukan oleh tujuan dan tanggung jawab yang sama sebagai sebuah bangsa. Hal tersebut menjadi dasar bagi kebijakan Rusia baik domestik maupun internasional.

### **Referensi**

- All-Ukrainian Population Census' 2001. 2003-2004. "About number and composition population of AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA by data All-Ukrainian population census'," <<http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/Crimea/>>, diakses 10 Oktober 2017.
- \_\_\_\_\_. 2003-2004. "Linguistic Composition of Population Autonomous Republic of Crimea," <<http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/language/Crimea/>>, diakses 10 Oktober 2017.





- Baltic Surveys/Gallup. 2013. "Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea May 16-30, 2013,"  
<<http://www.iri.org/sites/default/files/2013%20October%20Survey%20of%20Crimean%20Public%20Opinion,%20May%2016-30,%202013.pdf>>,  
diakses 05 Maret 2018.
- Bebler, Anton. 2015. "Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict," *Romanian Journal of European Affairs*, Vol. 15. No. 1, pp. 35-54.
- Fahrurudji, A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fom. 2009. "Мнения и взгляды населения Украины в сентябре - октябре 2009 года," <[http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain\\_eo/du091015](http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_eo/du091015)>, diakses 10 Oktober 2017.
- Gazpromexport. 2016. "Delivery Statistics: Gas Supplies to Europe,"  
<<http://www.gazpromexport.ru/en/statistics>>, diakses 02 Oktober 2016.
- Gerlach, Julia dan Jochen Töpfer. 2015. *The Role of Religion in Eastern Europe Today*. Wiesbaden: Springer VS.
- GfK Ukraine. 2014. "Public Opinion Survey in Crimea," <[http://avaazpress.s3.amazonaws.com/558\\_Crimea.Referendum.Poll.GfK.pdf](http://avaazpress.s3.amazonaws.com/558_Crimea.Referendum.Poll.GfK.pdf)>, diakses 09 Maret 2018.
- Girgin, Dogan. 2015. "Geopolitical Issues in the Current Crisis Between Ukraine and Russia," *Journal of Social Science*, Vol. 4. No. 1, pp. 21-24.
- Kartini, Indriana. 2014. "Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi Bagi Ukraina," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11. No. 2, pp. 27-41.
- Kramer, Mark. 2014. "Why Did Russia Give Away Crimea Sixty Years Ago?," <<https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago?gclid=CLHnyZC7ndACFSLicgod-UEIXw>>, diakses 28 November 2017.
- Kremlin. 2013. "Meeting of the Valdai International Discussion Club," <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243>>, diakses 29 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Address by President of the Russian Federation," <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>>, diakses 30 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Meeting of the Valdai International Discussion Club," <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/46860>>, diakses 30 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Presidential Address to the Federal Assembly," <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173>>, diakses 29 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Meeting of the Russian Literature and Language Society," <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/52007>>, diakses 29 Agustus 2017.
- Kyiv Post. 2014. "Crimea Hit by Multiple Sanctions as Power, Transport and Banking Communications are Cut Off," <<https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/crimea-hit-by-multiple-sanctions-as-power-transport-and-banking-communications-are-cut-off-376206.html>>, diakses 12 Maret 2018.
- Larsen, Olga. 2016. *The Crimean Annexation*, Tesis M.A, Norwegian University of Life Science. <<https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2407448/Master%20thesis%20Olga%20Larsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, diakses 14 November 2016.
- Laruelle, Marlene. 2016. "The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Garde in Russia," *The Russian Review*, Vol. 75. No. 4, pp. 626-644.
- Maitra, Sumantra. 2014. "Realism in Russian Foreign Policy: The Crimean Case," *CLAWS Journal*, pp. 116-128.



- Marxsen, Christian. 2014. "The Crimea Crisis: An International Law Perspective," Heidelberg Journal of International Law, Vol. 74. No. 2, pp. 367-391.
- Medvedev, Dmitry. 2014. "Russia and Ukraine: Living by New Rules," <<http://government.ru/en/news/16118/>>, diakses 11 Oktober 2017.
- Myers, Steven Lee. 2015. *The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin*. New York City: Knopf Doubleday Publishing Group.
- Oktaviano, Devindra Ramkas dan Yuli Fachri. 2015. "Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014," Jurnal Transnasional, Vol. 7. No. 1, pp. 1898-1913.
- Osborn, Samuel. 2016. "UN accuses Russia of multiple human rights abuses in Crimea," <<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-crimea-putin-human-rights-abuses-un-accusations-claims-a7421406.html>>, diakses 24 November 2016.
- Sergunin, Alexander dan Leonid Karabeshkin. 2015. "Understanding Russia's Soft Power Strategy," Political Studies Association, Vol. 35. No. 3-4, pp. 347-363.
- Sergunin, Alexander. 2016. *Explaining Russian Foreign Policy Behavior: Theory and Practice*. Stuttgart: Ibidem Press.
- Svarin, David. 2016. "The Construction of 'Geopolitical Spaces' in Russian Foreign Policy Discourse Before and After the Ukraine Crisis," Journal of Eurasian Studies, Vol. 7. No. 2, pp. 129-140.
- Tandilashvili, Dana. 2015. "Classical Realist and Norm-Based Constructivist Analysis of Russia's Invasion of Ukraine and Annexation of Crimea," Classical Realist and Norm-Based Constructivist, Vol. 49. No. 1, pp. 1-14.
- United Nations. 2016. "Third Committee Takes Up 7 Draft Resolutions on Situations in Syria, Iran, Crimea as It Concludes Discussion of Human Rights Council's Report," <<http://www.un.org/press/en/2016/gashc4186.doc.htm>>, diakses 24 November 2016.
- \_\_\_\_\_. 2016. "General Assembly of The United Nations Resolutions 71st Session," <<http://www.un.org/en/ga/71/resolutions.shtml>>, diakses 11 Maret 2018.
- Yeşilot, Okan. 2014. "The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics," Insight Turkey, Vol. 16. No. 2, pp.167-181.
- Zevelev, Igor. 2016. "Russian National Identity and Foreign Policy," A Report of the CSIS Russia and Eurasia Program. Center for Strategic and International Studies. <[https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/161208\\_Zevelev\\_RussianNationalIdentity\\_Web.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/161208_Zevelev_RussianNationalIdentity_Web.pdf)>, diakses 11 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. "The Russian World Boundaries: Russia's National Identity Transformation and New Foreign Policy Doctrine," <<http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Russian-World-Boundaries-16707>>, diakses 27 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. "The Russian World in Moscow's Strategy," <<https://www.csis.org/analysis/russian-world-moscows-strategy>>, diakses 12 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Метаморфозы русского мира: чем Россия заплатила за Крым," <<https://www.rbc.ru/opinions/society/18/03/2016/56eba3b59a7947ebe61847dc>>, diakses 27 Agustus 2017.